

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas penangkapan ikan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong menyumbang 70% hingga 90% dari total hasil tangkapan laut di Lamongan sepanjang tahun 2013-2022, sehingga menjadikannya pusat produksi ikan terbesar di Jawa Timur (Munir, 2023). Kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong tidak hanya sebatas tempat pendaratan kapal, tetapi juga sebagai distribusi hasil laut ke berbagai daerah di Indonesia (Wahyudi & Basuki, 2023).

Tingginya aktivitas penangkapan dan distribusi hasil laut di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistem laut di wilayah perairan Laut Jawa, data menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi sumber daya ikan di perairan Laut Jawa sebagai zona tangkap nelayan Brondong telah mencapai 95% dari total populasi, sehingga hanya menyisakan 5% bagi keberlanjutan stok ikan untuk generasi mendatang (Izzati & Ummah, 2018). Situasi tersebut menunjukkan indikasi kuat terjadinya overfishing yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Kondisi ini semakin diperparah oleh meningkatnya intensitas penangkapan yang tidak diimbangi dengan praktek perikanan berkelanjutan. Selain itu, sebagian nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong masih menggunakan alat tangkap yang bersifat tidak selektif dan berpotensi merusak habitat laut (Yusrizal, 2019).

Alat tangkap yang bersifat tidak selektif menimbulkan masalah berupa eksploitasi ekosistem laut secara berlebihan, seperti halnya alat tangkap ikan berjenis cantrang. Data Kementrian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa dalam sekali operasi cantrang, hanya 46%-51% hasil tangkapan yang layak konsumsi,

sementara sisanya berupa tangkapan sampingan yang berpotensi merusak ekosistem laut (Fauzi, 2018). Sebaliknya, penggunaan alat tangkap rawai, bubu dan tradisional lainnya yang lebih selektif justru digunakan terbatas, sehingga kontribusninya dalam mengurangi tekanan ekologis belum dapat dirasakan secara signifikan (Wardani, 2023).

Permasalahan ekologi dari nelayan pengguna alat tangkap yang bersifat tidak selektif tidak hanya mengancam keberlanjutan stok ikan, tetapi juga memunculkan konflik sosial di kalangan nelayan dan pemangku kepentingan, konflik kerap muncul antara nelayan pengguna alat tangkap yang lebih selektif seperti rawai, bubu, dan alat tradisional lainnya dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak selektif. Nelayan tradisional merasa dirugikan karena ruang tangkap mereka semakin menyempit akibat dominasi armada dengan alat tangkap yang mampu menjangkau area lebih luas dan kerap masuk ke zona tangkapan nelayan kecil yang pada akhirnya memicu konflik ruang tangkap (Juli & Mutmainah, 2025). Sementara itu, nelayan pengguna alat tangkap tidak selektif beramsusi bahwa alat tangkap tersebut memberikan efesiensi ekonomi dan keuntungan yang lebih cepat, dalam perbedaan kepentingan ini tidak jarang menimbulkan gesekan (Asnawi, 2022).

Selain konflik antar nelayan, terdapat pula konflik relasi antara nelayan dan pemerintah dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya laut, terutama menyangkut kebijakan larangan penggunaan alat tangkap berjenis cantrang. Larangan penggunaan cantrang sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 2 ayat (1), kemudian di pertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 secara khusus membatasi penggunaan jaring Cantrang (Febriyanti & Darmawan, 2024). Nelayan menganggap kebijakan tersebut memberatkan secara ekonomi tanpa memberikan solusi yang memadai, misalnya penyediaan teknologi ramah lingkungan dengan biaya terjangkau (Asnawi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa isu perikanan di PPN Brondong tidak hanya menyangkut aspek ekologi, namun serta tidak terlepas dari

permasalahan sosial dan ekonomi. Dari pelabuhan inilah bisa terlihat dinamika konflik nelayan, hingga dampak ekologis.

Penelitian terdahulu oleh Wildan Fadhil Amanullah (2023) menerapkan pendekatan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Pendekatan ini menilai status pengelolaan perikanan melalui enam domain, yakni teknik penangkapan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, dengan tujuan mengukur keberlanjutan dan merumuskan strategi pengelolaan. Meskipun pendekatan EAFM menekankan keseimbangan ekosistem secara teknis dan ekologis, penelitian tersebut masih bersifat indikatif. Penelitian terdahulu belum mengupas secara mendalam akar konflik sosial yang timbul dari perbedaan kepentingan antar nelayan maupun antara nelayan dan pemerintah.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-ekologi yang tidak hanya meninjau aspek teknis dan ekonomi, tetapi secara khusus menjadikan konflik nelayan sebagai pusat analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana tekanan ekologis memicu dinamika sosial, dan sebaliknya, bagaimana konflik sosial mempengaruhi upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pendekatan sosio-ekologi menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan integratif antara dimensi sosial dan ekologi. Hal ini sekaligus mengisi celah yang belum terjawab dari penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi baru dalam merumuskan model pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan secara sosial maupun ekologis

Pendekatan sosio-ekologi dalam pengelolaan perikanan tangkap dalam penelitian ini terfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya perikanan yang merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi masyarakat pesisir, baik dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial. Dalam realitasnya, pengelolaan perikanan tangkap sering kali tidak berjalan dengan baik dan menimbulkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, model yang berbasis sosio-ekologi dianggap pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memastikan pengelolaan perikanan tangkap dapat berkelanjutan secara ekologi dan sosial.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengelolaan perikanan tangkap dengan pendekatan sosio-ekologi untuk menjaga keberlanjutan pelestarian lingkungan (studi kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan perikanan tangkap.
- b. Mengidentifikasi bagaimana model pendekatan sosio-ekologi dapat diterapkan dalam pengelolaan perikanan tangkap.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiologi, khususnya kajian sosiologi lingkungan, melalui pemahaman tentang hubungan timbal balik antara sistem sosial dan ekologi
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya dengan tema yang sama yaitu sosio-ekologi dalam pengelolaan perikanan tangkap untuk menjaga keberlanjutan pelestarian lingkungan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Manfaat Bagi Objek Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membuka pandangan-pandangan baru pada objek penelitian dan menjadi evaluasi terhadap pengelolaan daerah tangkap

- b. Manfaat Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, bagaimana sosio ekologi terhadap pengelolaan perikanan tangkap.